



Drs Parjiman MA

Wakil Rektor Bidang AI Islam dan Kemahmadiyah
Dosen Fakultas Agama Islam - UAD

PANDEMI Covid-19 memang berdampak kian besar terhadap berbagai aspek kehidupan manusia saat ini. Tingginya tingkat kematian dan masifnya pemberitaan mengenai depresi yang dialami orang-orang, menegaskan kembali bahwa hakikatnya manusia adalah makhluk yang lemah di hadapan Allah Swt serta tidak dapat dilepaskan dari aspek jasmaniah dan rohaniannya. Tanpa pandang bulu, hampir seluruh kalangan merasakan dampak dari pandemi ini, baik dari segi sosial, perekonomian, pendidikan, kesehatan (fisik dan psikis), dan seterusnya.

Menumbuhkembangkan Spiritualitas Mahasiswa di Masa Pandemi

LETERA

para mahasiswa, dalam rangka menghadapi terpaan Pandemi Covid-19.

Menggunakan Epistemologi Al-Jabiri

Sejatinya, lewat epistemologi bayani, burhani, dan irfani yang dikembangkan oleh Abed Al-Jabiri, pendidikan tinggi Islam sejak awal telah mempunyai strategi tersendiri dalam menghadapi potensi degradasi spiritualitas, baik karena faktor dari dalam diri manusia (internal) maupun faktor eksternal seperti pandemi saat ini. Artinya, ada strategi-strategi yang ditawarkan untuk menumbuhkembangkan spiritualitas secara berkelanjutan dalam proses pendidikan.

Pertama, pendekatan bayani yang sifatnya lebih tekstual, digunakan untuk memberikan wawasan-wawasan seputar Al-Qur'an, hadis, tafsir, akidah, fikih

ibadah, akhlak, dan seterusnya. Pendekatan ini sifatnya benar-benar tekstual-informatif, atau dalam taksonomi Bloom, sepadan dengan proses pemanfaatan daya kognisi yang ada dalam diri manusia.

Penekananannya adalah aspek pengetahuan. Pendekatan pertama akan menjadi basis bagi proses-proses dalam pendekatan berikutnya.

Kedua, pendekatan burhani kita dapati dalam materi-materi perkuliahan yang berusaha membina pemahaman kepada mahasiswa mengenai pertautan antarilmu, dalam hal ini antara ilmu keislaman dengan disiplin ilmu-ilmu lainnya (Islam interdisipliner). Jadi, eksplorasinya mengarah pada pemahaman bahwa keislaman tidak hanya berhenti pada norma-norma, melainkan juga diintegrasikan dengan ilmu-ilmu lain.

Singkatnya, ketika pendekatan bayani digerakkan arah burhani, kita mendapati kaitan yang sangat variatif. Pendekatan burhani adalah proses

mendialogkan keimanan seseorang dengan realitas di sekitarnya.

Ketiga, pendekatan irfani memungkinkan pengetahuan atau wawasan yang didapatkan dalam proses bayani—misalnya tentang ibadah salat—mengarahkan seseorang kepada aspek spiritualitas, yakni penanaman nilai-nilai dan keyakinan di hati kita, bahwa salat pada hakikatnya adalah mikrajnya seorang muslim: merasa benar-benar berhadapan dengan Tuhan-Semesta-Alam, karena sejatinya seluruh doa dalam aktivitas tersebut adalah doa yang mendekatkan kepada Allah. Dalam bahasa Al-Qur'an: dengan mendirikan salat, sejatinya kita meninggalkan perbuatan keji dan mungkar. Efek dari salat tersebut sudah merambah pada aspek psikomotorik, yang artinya bukan sekadar ritual lagi, melainkan masuk kepada nilai yang bersifat lebih operasional.

Ketiga aspek tersebutlah yang terus ditanamkan secara berkon-

tinuitas kepada mahasiswa dalam proses pendidikannya. Dengan pendekatan bayani, kita mendapatkan pengetahuan tentang Islam, yang selanjutnya wawasan tersebut secara burhani dikoneksikan atau disintesiskan dengan kenyataan dalam masyarakat. Wawasan-wawasan tersebut dapat dipergunakan untuk mengatasi berbagai problem, termasuk problem kesehatan di negara Indonesia karena pandemi seperti saat ini.

Hal ini tentu akan berkaitan dengan pengetahuan mengenai akhlak terhadap masyarakat dan negara. Pemahaman tersebut, ketika ditarik ke ranah irfani atau dibarengi dengan watak muraqabah—yakni pencapaian tinggi seorang hamba karena merasa selalu dibersamai Allah—maka seluruh rintangan yang ia dapati dalam kehidupan, pasti akan memiliki penyelesaian terbaik di tangan Sang Maha Pencipta. **

KEMENDAGRI APRESIASI PEMKAB KULONPROGO

Persentase Pembayaran Innakesda Lampau Daerah Lain

WATES (KR) - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengapresiasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulonprogo telah melakukan pemenuhan pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan Daerah (Innakesda) di wilayahnya.

Mendagri Muhammad Tito Karnavian dalam surat perihal pemberian apresiasi atas pencapaian realisasi APBD menegaskan, sesuai data Laporan Realisasi APBD serta hasil monitoring dan evaluasi (monev) Kemendagri sampai 1 Agustus 2021, pihaknya pantas menyampaikan apresiasi pada

Pemkab Kulonprogo atas pencapaian realisasi belanja daerah dengan persentase sebesar 54,64 persen dari total belanja daerah serta melampaui angka persentase realisasi belanja daerah kabupaten dan kota secara nasional sebesar 35,88 prsen.

Bupati Drs Sutedjo bersyukur kinerja keuangan



KR-Asrul Sani

Drs Sutedjo

Pemkab Kulonprogo di apresiasi pemerintah

pusat (Kemendagri).

"Sesungguhnya kami hanya menindaklanjuti kebijakan Pusat, karena kami bersungguh-sungguh melaksanakan arahan Pusat dan hasilnya memang seperti yang diharapkan Pusat, maka kita diapresiasi oleh Pusat," ujarnya.

Prestasi tersebut bisa dicapai karena semua organisasi perangkat daerah termasuk Badan Keuangan Aset Daerah mampu menunjukkan kinerja yang baik.

REFLEKSI MENUJU UUK

Peristiwa Penting Keistimewaan

SECARA kultural keistimewaan Yogyakarta telah berakar pada nilai-nilai kearifan lokal yang termanifestasikan dalam kebijakan yang mengatur tentang sikap, perilaku masyarakat dan pemimpinnya serta dalam pengelolaan pendidikan, tata ruang serta tatanan sosial ekonomi dan politik pemerintahan.

Hal itu dikatakan Tenaga Ahli Paripara Praja dari Pusat Studi Pancasila UGM Hendro Muhaimin MA terkait diskusi sejarah mengenai lahirnya Undang-Undang No 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan DIY.

Rekaman video diskusi yang digelar dalam rangkaian refleksi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY (UUK 13/2012) akan ditayangkan di YouTube Paniradya Kaistimewan DIY <https://youtube.com/c/PaniradyaKaistimewan>.

Lebih lanjut Hendro Muhaimin MA mengatakan, dasar keistimewaan DIY adalah adanya pengakuan bahwa, keistimewaan DIY berakar dari eksistensi Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman yang telah mempunyai wilayah, pemerintahan, serta penduduk sebelum lahirnya NKRI pada 17 Agustus 1945.

Menurut Hendro Muhaimin, ada sejumlah peristiwa penting mengiringi perjalanan Keistimewaan DIY seperti peristiwa pada 19 Agustus 1945, tentang Piagam Kedudukan yang diberikan oleh Presiden Soekarno kepada Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan KGPAA Paku Alam VIII. "Piagam Kedudukan ini merupakan bentuk penghargaan atas bergabungnya Yogyakarta dengan Republik Indonesia," katanya.

Kemudian peristiwa pada 1 September 1945, setelah mengetahui sikap rakyat Yogyakarta terhadap Proklamasi Kemerdekaan, Sultan HB IX mengadakan pembicaraan dengan Sri Paduka PA VIII dan Ki Hajar Dewantoro serta tokoh lainnya mengenai sikap Yogyakarta.

"Selanjutnya 5 September 1945, Sultan HB IX mengeluarkan amanat yang menyatakan bahwa, Kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat bergabung dengan Republik Indonesia. Sri



KR-Riyana Ekawati
Hendro Muhaimin MA

Paduka Paku Alam VIII juga melakukan hal sama," katanya.

Peristiwa penting lainnya, lanjut Hendro Muhaimin, pada 5 Januari 1946, Yogyakarta menjadi Ibukota Indonesia.

"Situasi 1965 cukup berbeda, ada UU 18/1965 tentang Pemerintahan Daerah berlaku dan menandai Yogyakarta menjadi provinsi. Undang-undang ini juga mengisyaratkan penghapusan status istimewa bagi Yogyakarta kelak di kemudian hari," katanya.

Sedangkan situasi 1974, lahir UU 5/1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Aturan ini menyebutkan, Yogyakarta adalah provinsi yang dipimpin oleh gubernur dan wakil gubernur. "Dengan UU ini, susunan dan tata pemerintahan DIY praktis menjadi sama dengan daerah-daerah lain di Indonesia," jelasnya.

Sultan HB IX kembali aktif melaksanakan tugas sebagai Gubernur/Kepala Daerah Istimewa setelah berhenti sebagai wakil presiden pada tahun 1978.

"Melihat keistimewaan yang semakin kabur, DPRD DIY periode 1977-1982 menyatakan pendapat dan kehendaknya bahwa, sifat dan kedudukan istimewa DIY perlu dilestarikan terus sampai masa mendatang sesuai dengan UUD 1945 dan isi serta maksud UU 3/1950," katanya.

Beberapa peristiwa tersebut merupakan tonggak sejarah baru bagi keraton yang sejak itu berada dalam naungan NKRI, untuk merdeka dan berdaulat bersama seluruh komponen bangsa.

Dengan pemahaman itu pula, lanjut Hendro Muhaimin, sudah selayaknya seluruh warga bangsa ini mengapresiasi hasil perjuangan para perintis kemerdekaan, termasuk Sultan HB IX yang telah lama menempatkan keraton sebagai daya dukung di balik keinginan bersama untuk merdeka.

Terasuk pula rakyat DIY, yang memiliki posisi sama, merasakan kondisi yang sama dan sama-sama berkeinginan luhur, yaitu bekerja sama untuk mendorong terciptanya bangsa yang merdeka dan berdaulat. (Ria)

KETUA DPRD KUNJUNGI 23 PASKIBRAKA

1 Anggota Berstatus Yatim Piatu Butuh Uluran

WONOSARI (KR) - Ketua DPRD Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih SE mengunjungi dan memberikan bantuan kepada 23 anggota Paskibra Kabupaten Gunungkidul yang tengah menjalani isolasi mandiri karena terkonfirmasi positif Covid-19. Selain memberikan bantuan makan anjangan kasih tersebut dilakukan untuk memberi semangat dan memastikan kondisi mereka kesehatan para anggota paskibra. Adapun paket bahan makanan diberikan untuk membantu pemenuhan makan para anggota

Paskibra selama menjalani isolasi mandiri. Diantara Ketua DPRD juga mengunjungi Alviansyah Arifki, warga Padukuhon Kajar III, Kalurahan Karangtengah, Kapanewon Wonosari yang ternyata adalah seorang yatim piatu. Kedua orang tuanya sudah meninggal dunia karena sakit.

Suasanu haru terasa saat Ketua DPRD melihat kondisi Alvia yang menjalani isolasi mandiri seorang diri. Selain hidup sebatang kara Arifki juga harus hidup dengan fasilitas seadanya. Bahkan bangunan rumah tinggal yang ditempati se-

derhana, tidak ada kasur maupun tempat tidur. Melihat kondisi tersebut Endah Subekti langsung memberikan tempat tidur yang layak untuk Arifki. Sehingga bocah tersebut bisa tidur dengan nyaman dan diharapkan kondisi kesehatannya segera pulih.

Menurut Ketua DPRD Endah Subekti, pemantauan secara langsung seperti ini sangat penting sehingga bisa diketahui kondisi di lapangan itu seperti apa. "Kami berharap OPD terkait dan Puskesmas melakukan pemantauan dan penanganan yang tepat dan tepat," katanya Senin (23/8) kemarin.

Dalam waktu dekat pihaknya juga akan memanggil OPD terkait untuk membahas tentang bantuan bedah rumah bagi Arifki.

Sebab setelah dicek, memang rumah yang dihuni oleh Arifki ini masih memerlukan bantuan. Selama ini, belum pernah ada bantuan yang diterima oleh pelajar yang tinggal sendirian itu. Pembahasan melalui OPD terkait akan dilakukan tentang usulan bedah rumah baik menggu-

nakan anggaran APBD Kabupaten Gunungkidul atau melalui CSR. Sedangkan bantuan yang kemarin diberikan ini merupakan penanganan jangka pendek. Karena Arifki ini pelajar berprestasi dan dalam kondisi perlu bantuan maka agari disiapkan penanganan jangka panjang bagaimana nanti sekolahnya bisa tetap terus berlanjut hingga jenjang yang lebih tinggi sehingga kehidupannya bisa maju.

"Tawaran kami sampaikan kepada Arifki agar mau jadi anak asuh dan tentu kesediaannya agar dipikirkan terlebih dahulu," ucapnya.

Melihat kondisi Arifki sekarang ini memang membutuhkan dukungan baik dari lingkungan, pemerintah dan lainnya. Dia tinggal sendirian di rumah sederhana milik kakeknya. Tetapi rumah tersebut masih belum sempurna. Daun jendela yang ada hanya tertutup gedhek atau anyaman bambu. Tidak ada perabotan, bahkan tempat tidur pun tidak ada. (Bmp)



KR-Bambang Purwanto

Endah Subekti Kuntariningsih SE kunjungi anggota Paskibra yang isoman Covid-19

PILUR TANGGAL 30 OKTOBER 5.208 Petugas Diterjunkan di 744 TPS

WONOSARI (KR)- Sebanyak 5.208 petugas diterjunkan untuk pelaksanaan pemungutan suara pada 744 tempat pemungutan suara (TPS) yang rencananya akan digelar pada hari Sabtu, 30 Oktober yang akan datang. Dalam bulan ini sudah memasuki tahapan pemutakhiran data pemilihan, penyusunan daftar pemilih sementara (DPS) dan sosialisasi pemilihan lurah kepada masyarakat. Panitia tingkat kalurahan sudah menyusun tata tertib, tahapan sesuai dengan ketentuan yang ada. Menejemen pemilihan lurah ada panitia kalurahan. "Se-Gunungkidul ada 744 TPS masing-masing membutuhkan 7 petugas sehingga jumlahnya mencapai 5.208 orang," kata Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DP3AKB dan PMD) Gunungkidul Muhammad Farchan SSos MAP, Selasa (24/8)

Pemutakhiran daftar pemilih sementara (DPS) akan diumumkan kepada masyarakat agar bagi warga yang sudah mempunyai hak pilih dan belum terdaftar dalam pemilih sementara dapat memberitahukan kepada panitia baik langsung maupun lewat kepala dukuh masing-masing. Setelah itu dilanjutkan dibuat daftar pemilih tetap (DPT). Tahapan selanjutnya akan dibuka pendaftaran calon lurah dan sebagainya. Sebagaimana diketahui, meskipun di tengah pandemi Covid-19, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul tetap akan melakukan pengisian 58 lowongan lurah. (Ewi)-f

DAMPAKNYA BESAR, DPRD MINTA Anggaran Padat Karya Ditingkatkan

PENGASIH (KR)- Anggaran padat karya di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) agar dinaikkan, sebab dampaknya besar, khususnya untuk pembangunan infrastruktur. Saat ini alokasi sekitar Rp 5,2 miliar, padahal dengan padat karya ini mampu menumbuhkan semangat gotong royong hingga menggerakkan ekonomi masyarakat.

Hal itu dikatakan anggota DPRD Kabupaten Kulonprogo Agus Supriyanta. "Contohnya, anggaran padat karya pembangunan infrastruktur corblok jalan lingkungan 200 meter di Pedukuhan Jimatan Kalurahan Jatirejo Kapanewon Lendah. Anggaran padat karya hanya Rp100 juta, dengan target 150 meter, dan sisanya 50 meter swadaya masyarakat. Artinya, padat karya ini mampu menggerakkan semangat gotong royong masyarakat, serta meningkatkan kualitas infrastruktur," ungkap Agus, Senin (23/8).

Anggaran Rp 100 juta, lanjut Agus, bila dikerjakan pihak ketiga dimungkinkan hanya bisa untuk membangun jalan lingkungan 100 meter. Hal ini berbeda jika dikerjakan secara padat karya, bisa mencapai 150 meter ditambah swadaya masyarakat hingga 50 meter.

"Terkadang upah harian untuk masyarakat tidak diambil untuk kepentingan umum. Bagi masyarakat, hal utama adalah infrastruktur jalan bagus, sehingga mereka dapat melakukan aktivitas dengan baik, dan lebih jauh diharapkan menggerakkan ekonomi masyarakat," ucap anggota Fraksi Golkar ini. (Wid)-f

PROKLAMASI DAN PIAGAM KEDUDUKAN

Yogya Pernah Jadi Ibukota RI

YOGYA memiliki peran penting dalam sejarah perjuangan bangsa. Bahkan Yogya pernah menjadi Ibukota RI, 4 Januari 1946 sampai 1949.

Menurut kolumnis Keistimewaan Yogya dan pengelola network 'Ruang Tamu Jogja Istimewa' Dr Haryadi Baskoro, ketika Jakarta tidak aman, maka sebagai wujud dukungannya kepada RI, Sultan HB IX memberikan solusi, sehingga Ibukota RI dipindahkan ke Yogya.

"Selama masa itu, Yogya memfasilitasi pemerintahan RI dan memperjuangkan eksistensi RI sampai Belanda mundur dan kedaulatan RI diakui oleh dunia," kata Dr Haryadi Baskoro ketika rekaman video dokumenter mengenai sejarah Proklamasi Kemerdekaan RI dan Piagam Kedudukan. Video dokumenter itu akan ditayangkan di YouTube Paniradya Kaistimewan DIY <https://youtube.com/c/PaniradyaKaistimewan>.

Dikatakan Dr Haryadi Baskoro, selama Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi Ibukota RI (1946-1949), Sultan HB IX melakukan keputusan-keputusan penting,



KR-Riyana Ekawati

Widihasto Wasana Putra dan Dr Haryadi Baskoro (kanan) saat syuting video dokumenter.

Pertama, memfasilitasi jalannya pemerintahan RI. Kedua, melakukan tindakan politis-militer yang strategis untuk menunjukkan eksistensi Yogya (RI) kepada dunia internasional melalui Serangan Umum 1 Maret 1949. Ketiga, mengurus mundurnya tentara Belanda dari Yogya.

Kemempat, menegakkan eksistensi RI dengan mengumandangkan 'Proklamasi Kedua' pada 30 Juni 1949. Kelima, mendukung dana untuk pemerintahan RI sebesar 6 juta Gulden.

Menurut Dr Haryadi Baskoro, poin penting dalam peristiwa perpindahan Ibukota RI ke Yogya adalah kontribusi Yogya

sebagai Ibukota RI 1946-1949 itu adalah kontribusi Daerah Istimewa Yogyakarta kepada RI. Sebab masa 1946-1949 itu sudah didahului proses penegasan bahwa Yogya adalah Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditegaskan secara lugas oleh HB IX dan PA VIII dalam Amanat 5 September 1945.

Tapi memang, soal eksistensi Keistimewaan DIY di dalam NKRI adalah soal dinamika hubungan Yogya dengan RI.

Dalam perjalanannya, dinamika itu mengalami pasang surut dari rezim ke rezim. Pada masa Orde Lama, era Orde Baru dan era Reformasi. (Ria)